

**EVALUASI PROGRAM
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA PUSTAKAWAN
DI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PUSTAKAWAN**



**OPONG SUMIATI
NIM 7647090905**

**Disertasi yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Doktor**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2020**

**PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TERBUKA/ PROMOSI
DOKTOR**

Promotor

Co-Promotor




Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, M.A.

Prof. Dr. Maruf Akbar, M.Pd.

Tanggal: 4-5-2020

Tanggal: 11-3-2020

NAMA

TANDA TANGAN

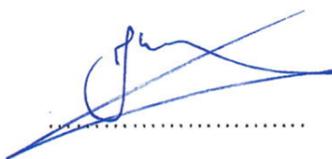
TANGGAL

Dr. Komarudin, M.Si
(Ketua)¹



22-6-2020

Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd
(Sekretaris)²



17-6-2020

Nama : Opong Sumiati

No. Registrasi : 7647090905

Program Studi : Ilmu Manajemen

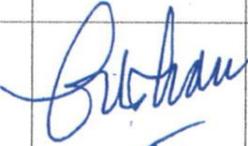
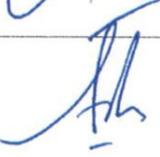
Tgl. Lulus :

¹Rektor Universitas Negeri Jakarta

²Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

**BUKTI PERSETUJUAN HASIL PERBAIKAN DISERTASI
SETELAH UJIAN TERTUTUP**

Nama Mahasiswa : Opong Sumiati
No Registrasi : 7647090905
Program Studi : Ilmu Manajemen

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd. (Ketua)		05 - 06 - 2020
2	Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si. (Sekretaris)		03 - 04 - 2020
3	Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, M.A. (Promotor)		04 - 05 - 2020
4	Prof. Dr. Maruf Akbar, M.Pd. (Co-Promotor)		11 - 03 - 2020
5	Prof. Dr. Burhanuddin Tola, M.A. (Penguji)		12 - 03 - 2020
6	Agung Dharmawan Buchdadi, M.M., Ph.D. (Penguji)		11 - 03 - 2020
7.	Prof. Dr. Masydzulhak, M.Si (Penguji Luar)		02 - 03 - 2020

ABSTRAK

SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA PUSTAKAWAN DI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PUSTAKAWAN

Opong Sumiati

Tujuan penelitian adalah mengevaluasi penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan dengan menggunakan model evaluasi program Konteks, Input, Proses, Product (CIPP). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi dan studi dokumen terkait. Data dianalisis dan dibandingkan dengan kriteria penilaian. Validasi data dilakukan dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian diperoleh, bahwa secara umum aspek dari setiap komponen program telah sesuai dengan kriteria evaluasi. Konteks program dilatarbelakangi oleh adanya amanat peraturan perundang-undangan bidang perpustakaan, sesuai kebutuhan dan permasalahan pustakawan maupun para pihak terkait. Input dalam perencanaan program meliputi: sumber daya, ruang lingkup, pelibatan *stakeholders*, perencanaan strategis, pengkajian awal, dan sosialisasi. Proses pelaksanaan sertifikasi memenuhi persyaratan BNSP, yaitu melalui pra-asesmen, asesmen dan pasca-asesmen. Produk program sertifikasi bermanfaat baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang untuk pustakawan dan organisasi/instansi dan asosiasi pustakawan. Direkomendasikan bahwa program perlu dilanjutkan dengan melakukan beberapa penyempurnaan terhadap aspek komponen input dan pelaksanaan program, sehingga diharapkan program sertifikasi dapat berjalan lebih baik dan agenda percepatan sertifikasi kompetensi kerja Pustakawan dapat terwujud.

Kata Kunci: Kompetensi Pustakawan; Sertifikasi Pustakawan; Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan; CIPP.

ABSTRACT

CERTIFICATION OF WORK COMPETENCE IN LIBRARIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION INSTITUTIONS

Opong Sumiati

The purpose of the study was to evaluate the implementation of the librarian work competency certification program using the Context, Input, Process, Product (CIPP) program evaluation model. Data collection is done by interviews, focus group discussions (FGD), observations and study of related documents. Data were analyzed and compared with assessment criteria. Data validation is done by triangulation techniques. The results were obtained, that in general aspects of each component of the program were in accordance with the evaluation criteria. The context of the program is motivated by the mandate of library laws and regulations, according to the needs and problems of librarians and related parties. Inputs to program planning include: resources, scope, stakeholder involvement, strategic planning, initial assessment, and outreach. The certification implementation process meets BNSP requirements, namely through pre-assessment, assessment and post-assessment. The product certification program is beneficial both for the short term and long term for librarians and organizations / agencies and librarian associations. It is recommended that the program needs to be continued by making some improvements to the aspects of the input components and program implementation, so that the certification program is expected to run better and the librarian work acceleration certification agenda can be realized.

Keywords: Librarian Competence; Librarian Certification; Librarian Professional Certification Institute; CIPP.

RINGKASAN

Pendahuluan

Tuntutan regulasi, paradigma baru tentang konsep profesional, kebutuhan dan permasalahan persaingan global khususnya di kawasan ASEAN, mengharuskan Pustakawan sebagai seorang profesional perlu disertifikasi kompetensinya oleh lembaga terpercaya. Fenomena ini memacu Perpustakaan Nasional RI sebagai Instansi Pembina, untuk meningkatkan kompetensi Pustakawan Indonesia sesuai standar, profesional dan berdaya saing, yakni melalui pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja Pustakawan.

Perpustakaan Nasional RI bersama-sama dengan beberapa perwakilan asosiasi profesi Pustakawan dan Kepustakawanan telah menginisiasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan. Lembaga ini berdiri tahun 2012 dengan berbadan hukum dalam bentuk LSP pihak ketiga (*third party*). Sejak tahun 2013 Perpustakaan Nasional RI mendukung dan memfasilitasi secara penuh penyiapan dan operasional lembaga tersebut untuk melakukan program sertifikasi kepada sejumlah pustakawan, baik dari instansi pemerintah maupun swasta.

Selama tujuh tahun, LSP Pustakawan baru melakukan sertifikasi sebanyak 1.511 orang pustakawan atau sekitar 20% dari jumlah tenaga perpustakaan yang tertera dalam pangkalan data Perpustakaan Nasional RI. Selama kurun waktu tersebut, belum dilakukan evaluasi program secara komprehensif.

Sertifikasi kompetensi kerja pustakawan merupakan sebuah program pemerintah yang bersifat strategis nasional dan telah difasilitasi pelaksanaannya secara penuh oleh pemerintah. Sehingga perlu ditinjau, diawasi dan dievaluasi pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja Pustakawan tersebut secara komprehensif, agar berjalan dengan optimal sesuai tujuan dan dapat mewujudkan agenda pemerintah untuk melakukan percepatan sertifikasi profesi.

Fokus dan Masalah Penelitian

Objek atau fokus penelitian yang dievaluasi adalah tentang Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan Indonesia. Masalah penelitian yang diajukan adalah

”Bagaimana Penyelenggaraan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan yang dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan?” dengan subfokus penelitian tentang: Latar belakang program sertifikasi, perencanaan program sertifikasi, pelaksanaan program sertifikasi, dan manfaat program sertifikasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Metodologi

Tujuan penelitian: Menilai latar belakang program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan; Menilai perencanaan pelaksanaan program sertifikasi; Menilai pelaksanaan program sertifikasi, serta; Menilai manfaat program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan.

Program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan merupakan sebuah sistem. Terdiri atas kumpulan kegiatan mulai dari *context* yang melatarbelakangi munculnya program, berbagai hal terkait *input* dalam perencanaan pelaksanaan program, proses pelaksanaan program dan *output* yang merupakan manfaat program tersebut. Sehingga model penelitian yang cocok adalah menggunakan model *Context, Input, Process, Product* (CIPP) dari Stufflebeam (2017). Penelitian ini diperkuat dengan model logika dasar (*basic logic model*) dari McLaughlin & Jordan (2004) bahwa, program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan dapat digambarkan sebagai transformasi yang disengaja dari sumber daya tertentu (*input*) menjadi kegiatan (*proses*) tertentu untuk menghasilkan hasil yang diinginkan (*hasil*) dalam konteks tertentu

Informan/narasumber penelitian adalah para pustakawan yang sedang dan telah mengikuti sertifikasi di tempat uji kompetensi LSP Pustakawan di Jakarta, personel LSP Pustakawan dan pihak terkait lainnya (*stakeholders*). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi dan studi dokumen dan literatur. Validasi data dilakukan melalui triangulasi teknik.

Hasil Penelitian

a. Latar Belakang Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan

Informasi berdasarkan studi dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil wawancara dan FGD, bahwa semua aspek komponen konteks Program Sertifikasi

Kompetensi Kerja Pustakawan memenuhi kriteria evaluasi, yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa, pustakawan sebagai jabatan profesional harus tersertifikasi; Sesuai dengan kebutuhan pustakawan di era pasar bebas untuk dapat bersaing dalam masyarakat global, untuk memenuhi tuntutan persyaratan profesional, untuk memenuhi persyaratan pengembangan karier dan untuk persyaratan akreditasi perpustakaan dan lembaga induk perpustakaan; Sesuai dengan masalah pustakawan tentang kompetensi belum diukur sesuai standar/terstandar belum mendapat pengakuan kompetensi dan jenjang karier pustakawan di lingkungan swasta belum tertata seperti pustakawan PNS.

Keputusannya, program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan memiliki konteks yang kuat karena didukung oleh ketiga aspek dari komponen konteks, yaitu perundang-undangan, kebutuhan dan permasalahan, baik pustakawan maupun *stakeholders*.

b. Perencanaan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan

Informasi berdasarkan wawancara, studi dokumen dan observasi sebagian besar aspek komponen input program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan memenuhi kriteria evaluasi, yaitu Sebagian besar sumber daya utama untuk pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan telah tersedia dan dimiliki. Yakni, terdapat Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) Pustakawan yang terlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tersedia standar kompetensi kerja pustakawan yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja Tahun 2012 yang diacu untuk melaksanakan asesmen sertifikasi kompetensi pustakawan. Kerangka Kualifikasi Nasional bidang perpustakaan sebagai turunannya belum ada. Konsekuensinya LSP hanya membuka paket kluster (*cluster*). Akan tetapi, secara pemenuhan kriteria tetap terpenuhi untuk aspek standard. Terdapat sumber daya manusia (personel) LSP Pustakawan yang tersertifikasi sesuai ketentuan BNSP, akan tetapi para personil memiliki tugas dan fungsi selain menangani kegiatan sertifikasi, sehingga kurang fokus. Jumlah asesor kompetensi terbatas mengakibatkan kinerja LSP Pustakawan kurang optimal.

Tersedia skema sertifikasi dan panduan mutu yang sudah disahkan BNSP sebagai acuan menyelenggarakan sertifikasi telah dimiliki LSP Pustakawan; Materi uji juga sudah dibuat sesuai dengan kluster kompetensi yang ditawarkan LSP Pustakawan.

Perangkat uji kompetensi tersedia sesuai ketentuan BNSP; Tempat uji kompetensi dan fasilitas serta perabotan, walaupun *sharing* dengan kegiatan lain yang ada di unit kerja Pusat Pengembangan Pustakawan cukup memadai karena jadwal pelaksanaan dapat diatur sedemikian rupa agar tidak bersamaan.

Perencanaan pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan telah melibatkan pihak terkait, baik sejak usulan pendirian, juga pada struktur organisasi atau personil LSP Pustakawan terdiri atas berbagai unsur *stakeholders* kepustakawanan dan target sertifikasi setiap tahunnya yang terdapat dalam renstra diturunkan dalam Rencana Anggaran Belanja Tahunan. Akan tetapi, belum terdapat *blue print* tentang pengembangan pustakawan secara komprehensif sehingga pengembangan program sertifikasi belum terarah dengan baik.

Ruang lingkup atau cakupan sertifikasi pustakawan tidak hanya untuk pustakawan di lingkungan Pegawai Negeri akan tetapi juga swasta. Paket sertifikasi berdasarkan kluster, meliputi mulai kluster tentang pengembangan koleksi, layanan pemustaka, literasi informasi dan preservasi. Kajian kesiapan implementasi sertifikasi dilakukan oleh para pustakawan yang mendapatkan hibah pengkajian dari anggaran Perpustakaan Nasional RI. Hasil dari kajian tersebut sebagian besar mendukung program sertifikasi. Sosialisasi, pemasyarakatan dan promosi dilakukan melalui seminar, rapat koordinasi, *showcase*, liflet, brosur dan media *online*.

Keputusan, program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan telah direncanakan dan mengikuti ketentuan Badan Nasional Standar Profesi (BNSP) yang berlaku walaupun belum optimal.

c. *Proses Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan yang Dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan*

Informasi berdasarkan studi dokumen dan peraturan perundang-undangan serta hasil wawancara dan observasi pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan LSP Pustakawan dinilai layak karena dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikat asesor kompetensi. Proses sertifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan BNSP melalui tahapan pra-asesmen dilanjutkan pelaksanaan asesmen dan diakhiri dengan aktivitas pasca-asesmen.

Peserta yang ikut sertifikasi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan dipublikasikan dalam situs resmi Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan sesuai yang tercantum dalam Skema Sertifikasi Pustakawan. Pustakawan dapat melakukan pendaftaran dengan mudah, baik secara langsung, pos-surat atau *online* dan pesawat telepon. Akan tetapi berdasarkan informasi informan, jawaban dan penjadwalan yang diperoleh dari sekretariat lama.

Pelaksanaan asesmen program sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan BNSP, yaitu mulai dari pemeriksaan daftar perangkat uji kompetensi oleh asesor kompetensi, memvalidasi dokumen yang dilampirkan calon peserta, mengenalkan diri kepada peserta, menyampaikan berbagai formulir, ketentuan, mekanisme dan metode uji kompetensi sesuai dengan jenis kluster yang diikutinya. Asesor melakukan asesmen dimulai dari kelompok umum lalu ke khusus, setelah dinyatakan kompeten. Durasi uji kompetensi antara dua sampai tiga hari bahkan ada yang lebih dari tiga hari ketika asesor memerlukan menggali bukti kompetensi peserta.

Hampir semua kewajiban LSP Pustakawan pada aktivitas pasca-asesmen dilaksanakan sesuai ketentuan, namun terdapat satu kegiatan LSP Pustakawan yang belum dilaksanakan adalah surveilan (*surveillance*) kepada para pemegang sertifikat.

Keputusan, Program sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan LSP Pustakawan dinilai layak karena sebagian aspek komponen proses sertifikasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan BNSP, yaitu dimulai dengan pra-asesmen, asesmen dan pasca-asesmen.

d. Manfaat Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan

Informasi berdasarkan studi dokumen dan peraturan perundang-undangan serta hasil wawancara dan FGD memenuhi kriteria evaluasi. Program sertifikasi memiliki dampak untuk jangka pendek bagi pustakawan yang tersertifikasi, seperti: dapat memberi pengakuan kompetensi, mendapatkan angka kredit, memenuhi persyaratan ketentuan Pustakawan, memenuhi persyaratan ketentuan akreditasi Lembaga, meningkatkan daya saing pustakawan, dan dapat meningkatkan penghargaan pustakawan. Program sertifikasi juga memiliki dampak untuk jangka panjang,

meningkatkan daya saing bangsa dan meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia secara langsung maupun tidak langsung.

Keputusan, program sertifikasi kompetensi memiliki manfaat jangka pendek maupun jangka panjang, baik untuk pustakawan yang bersangkutan, unit kerja atau lembaga induk tempat pustakawan bekerja, bahkan untuk daya saing tenaga kerja Indonesia di era pasar bebas dan manajemen talenta. Sehingga tujuan penyelenggaraan program telah tercapai sesuai kebutuhan dan masalah pustakawan dan para *stakeholders*.

Pembahasan

1. Konteks Program Sertifikasi Kompetensi Ke Perencanaan Pelaksanaan

Berdasarkan analisis komponen konteks, nilai (*value*) signifikansi program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan sangat tinggi, karena didukung oleh perundang-undangan yang berlaku, bahkan tertuang dalam dokumen visi dan misi Perpustakaan Nasional RI sebagai Instansi Pembina. Akan tetapi perlu menyusun kerangka kerja yang komprehensif, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mengembangkan alat penilaian yang tepat dan untuk menargetkan peluang pengembangan keterampilan (Townsend, et al., 2017). Dokumen tersebut penting karena memuat pilihan rencana tindakan (*action plan*) untuk proses sertifikasi (Greci, 2016).

Selain itu, perlu membuat surat edaran atau peraturan tentang kewajiban pustakawan memiliki sertifikat sertifikasi kompetensi dari LSP Pustakawan yang terlisensi. Perlunya sosialisasi sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan para pustakawan sebelumnya (Khayatun & Syaikhu, 2011; Naibaho, 2011; Puspitasari, 2015; Rahayu, Tupan & Nashihuddin, 2011). Walaupun promosi sertifikasi pustakawan yang dilakukan saat ini sudah bervariasi akan tetapi akan tetapi pelaksanaannya harus lebih ditingkatkan lagi.

Motivasi Pustakawan mengikuti sertifikasi karena adanya dorongan internal pustakawan sendiri, seperti karena perlu adanya pengakuan terhadap kompetensi yang dimilikinya, profesionalisme, pengembangan karier, penghargaan dan daya saing antar pustakawan (Puspitasari, 2015). Mendorong organisasi tempat pustakawan bekerja

untuk mengirim para pustakawannya mengikuti program sertifikasi kompetensi kerja apabila pada semua persyaratan akreditasi perpustakaan mencantumkan salah satu point penilaiannya adalah memiliki sumber daya perpustakaan yang kompeten, yaitu Pustakawan yang tersertifikasi.

2. Perencanaan Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan

Aspek utama dalam perencanaan pelaksanaan program adalah adanya standar kompetensi sebagai acuan sertifikasi kompetensi pustakawan (Black & Ham, 2005). Saat penelitian ini berlangsung, LSP Pustakawan masih menggunakan SKKNI Bidang Perpustakaan terbitan tahun 2012. Paket yang ditawarkan hanya sebatas paket kluster, disebabkan keterbatasan unit kompetensi pada SKKNI bidang Perpustakaan. Setelah terbitnya SKKNI bidang Perpustakaan yang baru beserta KKNi-nya, LSP Pustakawan perlu menguatkan lembaganya, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak untuk menyesuaikan materi dan pemaketan sertifikasi dengan standar baru dan KKNi-nya. Jumlah dan keragaman kepakaran asesor perlu ditambah. LSP Pustakawan harus memiliki SDM yang dapat bekerja secara fokus dan difasilitasi dengan baik sesuai kebutuhan.

3. Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan

Perubahan ketentuan permohonan blanko sertifikat yang diberlakukan BNSP berakibat lamanya proses penerbitan sertifikat sertifikasi kompetensi pustakawan. Hal ini dikarenakan buruknya pengelolaan dokumentasi dan pemberkasan LSP Pustakawan sehingga perlu personil yang menangani pengelolaan dokumen yang bertugas secara khusus. Perubahan mekanisme atau prosedur untuk mendapatkan blanko dan nomor sertifikat dari BNSP yang berubah mempengaruhi keterlambatan penerbitan sertifikat. Mekanisme hanya mengirimkan daftar secara manual diganti dengan menggunakan sistem aplikasi *online*. Blanko akan diperoleh setelah melengkapi berbagai data pendukung yang dituangkan melalui sistem aplikasi BNSP.

Pemberlakuan mekanisme tersebut sangat baik karena akan mempercepat mendapatkan blanko sertifikat sertifikasi, akan tetapi usaha awal perlu dilakukan dengan cepat, yaitu dengan mengerahkan personel LSP Pustakawan untuk

mengumpulkan dokumen yang berserakan akibat beberapa kali perpindahan sekretariat LSP Pustakawan. Selanjutnya mendigitalkan semua dokumen LSP Pustakawan tersebut dan meng-*upload*nya sesuai yang dipersyaratkan BNSP.

Penanggulangan yang diambil LSP Pustakawan saat ini adalah dengan memberikan surat keterangan 'Kompeten' kepada pustakawan yang dinyatakan kompeten setelah melalui asesmen sertifikasi.

4. Manfaat Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan

Berdasarkan analisis komponen hasil atau produk, manfaat program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan secara nasional adalah dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja bangsa Indonesia. Di era pasar global, organisasi sehingga perusahaan memungkinkan dapat menarik *talent* dari pasar tenaga kerja internasional (Noe et al, 2018). Seiring dengan adanya peraturan pemerintah Indonesia yang membuka kesempatan kepada tenaga kerja asing untuk dapat menduduki ratusan jenis jabatan profesional tertentu. Sehingga program ini perlu disempurnakan untuk keberlangsungannya ke depan. Perlu dilakukan secara masif dengan melibatkan semua pihak terkait untuk mendirikan dan mengelola berbagai bentuk LSP Pustakawan.

Kesimpulan

Program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan bertujuan untuk melaksanakan standardisasi kompetensi kerja pustakawan Indonesia. Program sertifikasi dilabelkan oleh amanat perundang-undangan kepastakawanan dan didukung oleh visi dan misi Perpustakaan Nasional RI sebagai Instansi Pembina yang dapat memenuhi kebutuhan pustakawan untuk mendapatkan pengakuan kompetensi dan mengembangkan karier dan dapat memecahkan masalah pembinaan dan pengembangan pustakawan dan persyaratan akreditasi institusi pustakawan dan pengembangan profesionalisme pustakawan.

Program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan telah direncanakan dengan baik, karena didukung oleh sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program, yaitu tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Perpustakaan, LSP Pustakawan yang terlisensi dan dikelola oleh personel sesuai ketentuan, dibantu oleh beberapa asesor lisensi dan asesor kompetensi yang tersertifikasi, tersedia perangkat, materi

dan metode uji dan sesuai dengan paket kluster, serta memiliki fasilitas dan anggaran tetap yang memadai. Program sertifikasi melibatkan beberapa *stakeholders* yang sebelumnya dilakukan kajian awal dan secara rutin telah dilakukan sosialisasi dan promosi ke seluruh provinsi.

Sertifikasi kompetensi kerja pustakawan dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang diterbitkan oleh BNSP. Dimulai dari pra-asesmen, dilanjutkan dengan pelaksanaan asesmen dan diakhiri dengan pasca-asesmen. Sertifikat yang diterbitkan LSP Pustakawan merupakan tahap lanjutan dari rekomendasi asesor kompetensi yang dirapatkan secara pleno di antara para personel LSP Pustakawan. Bagi pustakawan yang dinyatakan kompeten akan mendapatkan sertifikat yang dicetak pada blanko sertifikat bernomor secara urutan yang dikeluarkan oleh BNSP. Bagi yang masa berlakunya hampir habis, LSP Pustakawan memfasilitasi untuk perpanjangan sertifikasi yang bersangkutan.

Manfaat (*worth*) program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan. Program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan memiliki manfaat (*worth*) baik untuk individu pustakawan bersangkutan maupun bagi organisasi/instansi dimana pustakawan bekerja. Bagi individu selain mendapat pengakuan kompetensi juga meningkatkan profesionalitas, daya saing dan menunjang pengembangan kariernya. Sedangkan untuk organisasi/instansi memiliki dampak pada nilai citra, kinerja, akreditasi dan daya saing. Selain itu, juga program sertifikasi juga memiliki manfaat langsung maupun tidak langsung kepada asosiasi profesi dan bangsa atau negara kesatuan Indonesia.

Kewajiban LSP Pustakawan yang belum dilaksanakan adalah melakukan *surveillance* sebagai monitoring terhadap pada pemegang sertifikat kompetensi dan pengecekan tempat uji kompetensi. Program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan belum optimal dilakukan karena belum dikelola oleh personel secara terfokus, sehubungan dengan adanya keterbatasan dan kerancuan peranan personil LSP Pustakawan. Selain itu, Perpustakaan Nasional RI maupun LSP Pustakawan belum memiliki perencanaan yang terarah yang dituangkan dalam rancana induk pengembangan profesionalisme pustakawan melalui program sertifikasi kerja pustakawan, baik jangka menengah maupun Panjang.

Implikasi

Dasar penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan sangat kuat karena didukung oleh peraturan dan kebijakan pemerintah. Program tersebut dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan pustakawan dan pihak terkait (*stakeholders*) yang sedang berkembang. Sehingga, program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan yang sudah berkualitas baik perlu disosialisasikan dan dipromosikan akan pentingnya sertifikasi kepada para pustakawan seluruh Indonesia dan pihak terkait lebih gencar lagi.

Perencanaan pelaksanaan sertifikasi kompetensi telah dilakukan perpustakaan Nasional RI bersama-sama *stakeholders* dengan baik, akan tetapi secara kuantitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan. Hal ini sangat berdampak pada capaian target sertifikasi yang lambat sehingga jumlah pustakawan yang tersertifikasi masih sangat terbatas. Pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan telah sesuai dengan ketentuan BNSP, sehingga kelayakan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi pustakawan yang dilakukan oleh LSP Pustakawan dapat dipertanggungjawabkan, baik mutu maupun peruntukannya. Sehubungan dengan itu, LSP Pustakawan harus selalu memelihara dan meningkatkan fasilitas tempat uji kompetensi, perangkat uji, asesor lisensi dan asesor kompetensi serta menyesuaikan skema sertifikasi dengan SKKNI dan KKNI bidang perpustakaan yang berlaku.

Manfaat jangka pendek dari program tersebut yaitu untuk peningkatan karier dan profesionalisme pustakawan serta meningkatkan nilai dan kinerja organisasi. Manfaat program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan untuk jangka panjang adalah dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja di lingkup Asean bahkan internasional. Perpustakaan Nasional sebagai instansi teknis yang memiliki kewenangan membuat regulasi, perlu memasukkan sertifikasi pustakawan pada beberapa ketentuan yang diterbitkan Perpustakaan Nasional, seperti kriteria rekrutmen dan persyaratan menjadi pustakawan, kenaikan/promosi pustakawan, unsur penilaian akreditasi perpustakaan dan organisasi/lembaga.

Rekomendasi

Program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan merupakan program pemerintah yang strategis dan telah berjalan dengan baik, sehingga perlu dilanjutkan, diakselerasi dan dilakukan secara masif untuk memenuhi kebutuhan pustakawan dan instansi tempat ia

bekerja. Namun, terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan yaitu terkait aspek komponen input berupa sumber daya manusia dan melaksanakan *surveillance* kepada para pemegang sertifikat kompetensi pustakawan.

Secara simultan, akselerasi dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan secara masif dapat dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI sebagai Instansi Pembina Teknis/Sektor dengan beberapa hal berikut.

Menyusun *grand design* pengembangan profesionalisme pustakawan berbasis standar kompetensi yang memuat target jangka pendek dan jangka panjang dilengkapi penjadwalan dana tahapan capaian sebagai *milestone* arah capaian yang terarah; membuat peraturan Perpustakaan Nasional yang mengatur tentang kewajiban semua pustakawan memiliki sertifikat kompetensi sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 35 dan 36; menuangkan salah satu point penilaian akreditasi yang berasal dari kepemilikan sumber daya perpustakaan yang tersertifikasi pada semua jenis perpustakaan.

Beberapa masukan informan terkait dengan upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja pustakawan di antaranya mendirikan berbagai bentuk LSP Pustakawan; keterlibatan *stakeholders* dalam manajemen LSP Pustakawan, dan; pemisahan kewenangan. Hal tersebut perlu segera ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil analisis tujuan, perencanaan, implementasi dan hasil program sertifikasi, ternyata program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan memiliki sifat: transportabilitas (*transportability*) dan dapat disesuaikan (*adjustment*) serta berkeberlanjutan (*sustainability*)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, disertasi yang ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar doktor di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan disertasi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan disertasi dan sanksi-sanksi lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Mei 2020




Opong Sumiati



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: 021-4894221
Laman: lib.unj.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : OPONG SUMIATI
NIM : 7647090905
Fakultas/Prodi : Pascasarjana-Ilmu Manajemen-MSDM
Alamat email : osumiati@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain lain (.....)

yang berjudul :

"Evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan Di Lembaga Sertifikasi

Profesi Pustakawan"

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Juli 2020

Penulis

(OPONG SUMIATI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat Karunia dan Izin-Nya disertasi yang berjudul "Evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan di Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan" ini dapat diselesaikan. Tujuan penelitian adalah menilai program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan yang diselenggarakan Instansi Pembina/Sektor bidang Perpustakaan sebagai salah satu implementasi kebijakan strategis pemerintah secara komprehensif, yaitu mulai dari konteks sebagai latar belakang munculnya program, perencanaan program, pelaksanaan sebagai implementasi program dan manfaat program.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Perpustakaan Nasional RI, sebagai Instansi Pembina/Sektor bidang Perpustakaan dalam perumusan kebijakan dan penyusunan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan ke depan. Mengingat, program sertifikasi kompetensi kerja Pustakawan merupakan salah satu program yang memiliki dampak sipil maupun karier bagi Pustakawan Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Sehingga perlu evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan secara sistematis dan terarah.

Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengetahuan dan keterampilan penelitian evaluasi program dan memperkaya hasil penelitian evaluasi program, khususnya tentang pengembangan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan sehingga dapat menambah khasanah Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan dapat dijadikan referensi bagi akademisi yang akan melaksanakan penelitian berkaitan dengan evaluasi program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan di Indonesia.

Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan, sehingga diharapkan adanya penelitian lanjutan, yang lebih luas dan mendalam. Di atas semua itu, semoga penelitian evaluasi program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan ini bermanfaat dan dapat memenuhi kaidah penelitian sesuai yang berlaku. Amin

Jakarta, Mei 2020

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Keberhasilan penulis menyelesaikan penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari dorongan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, untuk semua partisipasi tersebut penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Komarudin, M.Si, sebagai Rektor Universitas Negeri Jakarta yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyelesaikan studi di Pascasarjana-Universitas Negeri Jakarta;
2. Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd, sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang telah memberi dukungan akademis dan administratif untuk penyelesaian studi di Universitas Negeri Jakarta;
3. Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si. sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Manajemen/MSDM Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang telah memberi memfasilitas dan dukungan akademis terhadap penyelesaian penyusunan disertasi;
4. Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, MA., sebagai promotor I, yang telah memberi bimbingan dan arahan sejak pencarian topik, penyusunan proposal, hingga penyelesaian penyusunan disertasi;
5. Prof. Dr. Maruf Akbar, M.Pd., sebagai promotor II, yang telah memberi bimbingan dan arahan sejak pencarian topik hingga penyelesaian penyusunan proposal penelitian, laporan hasil, dan disertasi;
6. Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si, sebagai Anggota Senat Universitas Negeri Jakarta, yang telah memberi bimbingan dan arahan penyempurnaan disertasi;

7. Prof. Dr. Burhanuddin Tola, M.A., sebagai Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta, yang telah memberi bimbingan dan arahan penyempurnaan proposal, laporan hasil, dan disertasi;
8. Prof. Dr. Adji Suratman, M.Ak, Guru Besar Tetap STIE YAI Penguji Luar yang telah memberi bimbingan dan arahan penyempurnaan disertasi,;
9. Yuli Rahmawati, Ph. D sebagai Penguji Seminar Proposal dan telah bersedia membimbing dan memberi masukan guna penyempurnaan proposal penelitian dan laporan hasil;
10. Dr. Budi Santoso, MM sebagai Penguji Seminar Kelayakan Hasil dan telah bersedia membimbing serta memberi masukan guna penyempurnaan penulisan laporan hasil penelitian;
11. Prof. Dr. Maydzulhak, M.M sebagai Penguji Luar pada Seminar Kelayakan Hasil dan telah bersedia membimbing serta memberi masukan guna penyempurnaan penulisan laporan hasil penelitian dan disertasi;
12. Agung Dharmawan Buchdadi, Ph.D, sebagai dosen pembimbing penulisan karya tulis ilmiah dan penulisan serta penyempurnaan disertasi.
13. Kepala Perpustakaan Nasional RI, sebagai pimpinan tertinggi Instansi Pembina/Teknis bidang Perpustakaan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian;
14. Dra. Woro Titi Haryanti, MA, sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI yang telah memberi dukungan dan fasilitas penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, penyusunan laporan hasil, dan penyusunan disertasi;

15. Dra. Endang Ernawati, MA., sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan yang telah memberi dukungan motivasi, fasilitas, dan data maupun informasi terkait dengan penelitian;
16. Agus Rifai, Ph.D. sebagai kolega dan Asesor kompetensi senior Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan yang telah memberi dukungan, data, bahan penelitian dan penulisan artikel ilmiah;
17. Kepala Bidang, Pustakawan dan Staf Pusat Pengembangan Pustakawan yang telah membantu menyediakan berbagai data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja pustakawan dan kepustakawanan lainnya;
18. Personil dan para asesor kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan yang telah bersedia menjadi partisipan dan narasumber penelitian, baik secara personal maupun ketika diskusi fokus terpimpin;
19. Nancy, Sekretaris Koordinator Program Studi Ilmu Manajemen/MSDM Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang selalu memberi informasi dan menyiapkan penyelesaian administrasi akademis;
20. Sahabat dan teman-teman seangkatan dan senasib di kampus Universitas Negeri Jakarta dan teman-teman sejawat di Perpustakaan Nasional RI dan Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan Indonesia yang telah menginspirasi dan memberi dorongan untuk tetap semangat menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
21. Suami, anak-anak dan cucu-cucu tercinta yang telah memberikan dukungan, baik waktu, moril maupun material sehingga terwujudnya disertasi untuk dapat penyelesaian studi di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih, memberikan balasan atas semua budi baik.
bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Aamiin.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
BUKTI PERBAIKAN SETELAH SEMINAR KELAYAKAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
RINGKASAN	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
UCAPAN TERIMA KASIH (<i>ACKNOWLEDGEMENT</i>)	xx
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxix
DAFTAR LAMPIRAN	xxxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	13
E. Signifikansi Penelitian	15
F. <i>State of the Art</i> dan <i>Novelty</i> Penelitian.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Evaluasi Program	21
1. Pengertian Evaluasi	21
2. Pengertian Evaluasi Program	22
3. Pengertian Sumber Daya Manusia	24
4. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia	27
5. Model Evaluasi Program	29
B. Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan	40

1. Pengertian Perpustakaan	40
2. Pengertian Pustakawan	42
3. Pengertian Kompetensi	47
4. Pengertian Sertifikasi	46
5. Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan	57
6. Program Sertifikasi Pustakawan Kerja Pustakawan	59
C. Model Context Input Process Product (CIPP)	66
D. Hasil Penelitian yang Relevan	75
E. Kriteria Evaluasi	87
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan tempat penelitian	108
B. Desain penelitian	108
C. Informan/Narasumber dan Teknik Pengumpulan Sampel	113
1. Informan/Narasumber	113
2. Jumlah dan Teknik Pengumpulan Sampel	114
D. Penyusunan Instrumen Penelitian	116
1. Komponen, Aspek dan Indikator	116
2. Kisi-kisi Instrumen	116
E. Data dan Teknik Analisis Data	123
1. Jenis dan Sumber Data	123
2. Teknik Pengumpulan Data	124
3. Teknik Analisis Data	127
4. Validasi Instrumen dan Data	130
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	132
1. Latar Belakang Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan	132
2. Perencanaan Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan.	147
3. Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan ..	189
4. Manfaat Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan	208

B. Pembahasan	214
1. Konteks Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan	214
2. Perencanaan Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan.	218
3. Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan ..	220
4. Manfaat Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan	222
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	230
B. Implikasi	233
C. Rekomendasi	235
 DAFTAR PUSTAKA	 xxxii-
	xxxviii
LAMPIRAN	255-312

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Komponen dan Aspek Penelitian 11
Tabel 2.1	Kriteria Evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan 92
Tabel 3.1	Daftar Informan/Narasumber 115
Tabel 3.2	Kisi Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan di Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan Menggunakan Model CIPP. 117
Tabel 3.3	Jenis Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 127
Tabel 4.1	Hasil Evaluasi Konteks Latar Belakang Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan 129
Tabel 4.2	Kebutuhan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan Menurut Informan 140
Tabel 4.3	Hasil Evaluasi Input Perencanaan Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Pustakawan 149
Tabel 4.4	Unit Kompetensi Dasar 163
Tabel 4.5	Unit Kompetensi Inti 164
Tabel 4.6	Unit Kompetensi Khusus 164
Tabel 4.7	Paket Sertifikasi dalam Skema Sertifikasi Tahun 2014..... 166
Tabel 4.8	Paket Sertifikasi dalam Skema Sertifikasi Tahun 2017..... 168
Tabel 4.9	Sumber Anggaran Program Sertifikasi 178
Tabel 4.10	Pelaksanaan Sertifikasi dengan Biaya Mandiri 179
Tabel 4.11	Perubahan Skema Sertifikasi Tahun 2018 184
Tabel 4.12	Kajian Persiapan Program Sertifikasi 186
Tabel 4.13	Tahapan Pelaksanaan Sertifikasi 190
Tabel 4.14	Hasil Evaluasi Proses Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan yang Dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan 192
Tabel 4.15	Aktivitas Asesor Saat Awal Asesmen 202
Tabel 4.16	Tahapan Saat Asesmen Sertifikasi 204
Tabel 4.17	Tahapan Pasca-asesmen Sertifikasi 208

Tabel 4.18	Hasil Evaluasi Manfaat Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan.....	211
Tabel 4.19	Kemungkinan Transportabilitas Program Sertifikasi	226
Tabel 4.20	Dasar Keberlanjutan Program Sertifikasi	228
Tabel 5.1	Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi	240

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Lokus Pelaksanaan Sertifikasi LSP Pustakawan 5
Gambar 1.2	Capaian Sertifikasi LSP Perpustakaan Tahun 2013-2019 6
Gambar 1.3	Perbandingan Jumlah Pustakawan Tersertifikasi 7
Gambar 1.4	Prosentase Perbandingan Jumlah Pustakawan Tersertifikasi 7
Gambar 2.1	Jenis dan Pendekatan Evaluasi 22
Gambar 2.2	Strategic HRM 28
Gambar 2.3	Sistem Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan 62
Gambar 2.4	Model Logika Dasar 64
Gambar 2.5	Komponen Evaluasi Program 67
Gambar 2.6	Model Evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi Pustakawan 69
Gambar 2.7	Kriteria Keberhasilan Program 87
Gambar 3.1	Disain Penelitian Evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan 109
Gambar 3.2	Langkah Penelitian Evaluasi Program Sertifikasi Pustakawan 111
Gambar 3.3	Evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan Menggunakan Model Evaluasi CIPP 112
Gambar 3.4	Alur Pengolahan Data 128
Gambar 3.5	Format Lembaran Kerja untuk Analisis Data 129
Gambar 3.6	Tahapan Pengolahan Data Hasil Wawancara 130
Gambar 4.1	Aspek Evaluasi Konteks 132
Gambar 4.2	Informasi Aspek Landasan Program 137
Gambar 4.3	Informasi Aspek Kebutuhan Program 141
Gambar 4.4	Informasi Aspek Permasalahan 145
Gambar 4.5	Aspek Evaluasi Input 147
Gambar 4.6	Tahapan Pembentukan LSP Pustakawan 161

Gambar 4.7	Aspek Standar Acuan Sertifikasi	165
Gambar 4.8	Manfaat Jangka Pendek Program Sertifikasi	209
Gambar 4.9	Manfaat Jangka Panjang Program Sertifikasi	210
Gambar 4.10	Media Promosi Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan	216
Gambar 4.11	Faktor Pendorong Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan	217
Gambar 4.12	Intervensi Untuk Meningkatkan Jumlah Peserta Sertifikasi	218
Gambar 4.13	Rangkaian Tahapan Memperoleh Sertifikat Kompetensi..	221
Gambar 4.14	Berbagai Bentuk LSP Pustakawan	224
Gambar 4.15	Keterlibatan Stakeholders dalam Manajemen LSP	226
Gambar 4.16	Tugas dan Fungsi Perpustakaan Nasional	225
Gambar 5.1	Rekomendasi Optimalisasi dan Akselerasi Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan	239
Gambar 5.2	Rekomendasi Model Optimalisasi dan Akselerasi Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan.....	240

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Daftar Informan/Narasumber Sesuai Komponen Evaluasi 255
Lampiran 2	Panduan Wawancara untuk Pengarah 256
Lampiran 3	Panduan Wawancara untuk Personel LSP 257
Lampiran 4	Panduan Wawancara untuk Asesor 258
Lampiran 5	Panduan Wawancara untuk Pustakawan 259
Lampiran 6	Panduan Fokus Group Discussion (FGD) 260
Lampiran 7	Daftar Cek Observasi 261
Lampiran 8	Daftar Cek (untuk komponen konteks) 264
Lampiran 9	Daftar Cek (untuk komponen input) 265
Lampiran 10	Daftar Cek (untuk komponen proses) 267
Lampiran 11	Daftar Cek (untuk komponen produk) 269
Lampiran 12	Kuesioner sederhana untuk pustakawan 271
Lampiran 13	Daftar Program Studi Dalam Rumpun Keilmuan Sains Informasi Di Indonesia Tahun 2020 275
Lampiran 14	Surat Undangan FGD 287
Lampiran 15	Surat Permohonan Narasumber (BNSP) 289
Lampiran 16	Surat Permohonan Izin Penelitian (Perpusnas) 290
Lampiran 17	Surat Permohonan Izin Penelitian (LSP) 291
Lampiran 18	Surat Izin Penelitian (Perpusnas) 292
Lampiran 19	Surat Izin Penelitian (LSP) 293
Lampiran 20	Akta Pendirian LSP Pustakawan 295
Lampiran 21	Sertifikat lisensi LSP Pustakawan 297
Lampiran 22	Panduan Mutu LSP Pustakawan 301
Lampiran 23	Sertifikat Asesor Lisensi 303
Lampiran 24	Sertifikat Kompetensi 305
Lampiran 25	Foto Kegiatan 307
Lampiran 26	Contoh promosi sertifikasi 313